

INTEGRATING MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH WITH NATIONAL REGULATIONS IN AN AUSTRALIAN ISLAMIC CENTRE COLLEGE

Azzahra Sindhi Latifa¹, Della Rahmayani²

UIN Raden Mas Said Surakarta¹⁻²

Email: zaraslatifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis bagaimana Australian Islamic Centre College (AICC) mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam tata kelola keselamatannya. Kajian ini menelaah lima dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan peserta didik, yaitu First Aid, Distributing Medicine, Anaphylaxis Management, Occupational Health and Safety, dan Child Safe Program. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen yang sistematis, penelitian ini mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan tujuan *maqāṣid*, yaitu perlindungan jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa First Aid berfungsi sebagai mekanisme utama *ḥifẓ al-nafs* melalui prosedur darurat dan pelatihan staf. Distributing Medicine mendukung *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* melalui pengaturan pemberian obat yang aman. Anaphylaxis Management memperkuat *ḥifẓ al-nafs* melalui identifikasi risiko dan kesiapsiagaan. Occupational Health and Safety mendukung *ḥifẓ al-mal* dan *ḥifẓ al-nafs* melalui pemeliharaan fasilitas. Child Safe Program mencerminkan *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-din* dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan etis. Penelitian ini menawarkan model penyelarasan nilai Islam dengan regulasi nasional.

Kata kunci: Maqāṣid al-Sharī'ah, Kebijakan Keselamatan Sekolah, Tata Kelola Pendidikan Islam, Ḥifẓ al-Nafs, Perlindungan Anak

Abstract

This study analyses how the Australian Islamic Centre College (AICC) integrates the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* into its safety governance framework. The research reviews five policy documents related to student protection: First Aid, Distributing Medicine, Anaphylaxis Management, Occupational Health and Safety, and the Child Safe Program. Using a descriptive qualitative approach through systematic document analysis, the study evaluates how these policies reflect the objectives of *maqāṣid*, namely the protection of life, intellect, religion, lineage, and property. The findings show that First Aid functions as a key mechanism of *ḥifẓ al-nafs* through emergency procedures and staff training. Distributing Medicine contributes to *ḥifẓ al-nafs* and *ḥifẓ al-'aql* by regulating safe medication practices. Anaphylaxis Management reinforces *ḥifẓ al-nafs* through risk identification and preparedness. Occupational Health and Safety supports *ḥifẓ al-mal* and *ḥifẓ al-nafs* by maintaining safe facilities. The Child Safe Program reflects *ḥifẓ al-nasl* and *ḥifẓ al-din* by promoting a secure and ethical school environment. Overall, the study offers a model for aligning Islamic values with national regulations.

Keywords: Maqāṣid al-Sharī'ah, School Safety Policy, Islamic Education Governance, Ḥifẓ al-Nafs, Child Protection

PENDAHULUAN

Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* dengan regulasi nasional menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan tata kelola keselamatan sekolah, khususnya pada lembaga pendidikan Islam

seperti Australian Islamic Centre College (AICC). Keselamatan dan kesehatan peserta didik merupakan aspek fundamental dalam pendidikan berkualitas. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang menjamin kesejahteraan fisik, mental, dan emosional peserta didik. Kompleksitas aktivitas belajar dan dinamika sekolah menuntut sistem perlindungan serta kebijakan keselamatan yang terstruktur (Fernandes et al., 2023; Mori et al., 2021). Data Australian Institute of Health and Welfare menunjukkan lebih dari 600 ribu kunjungan gawat darurat dan 89 ribu rawat inap anak-remaja di Australia akibat cedera (AIHW, 2024). Sementara itu, Australian Institute of Family Studies melaporkan sekitar 18% cedera non-olahraga pada remaja terjadi di sekolah (AIFS, 2021). Fakta ini menegaskan bahwa lingkungan sekolah, baik bagi siswa maupun staf, memerlukan kebijakan keselamatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, AICC membangun sistem perlindungan terpadu yang menegaskan keselamatan sebagai tanggung jawab kolektif. Setiap kebijakan menetapkan peran jelas bagi *Board*, *Principal*, staf, dan orang tua, dengan pengawasan melalui audit, pelatihan, serta pelaporan insiden yang rutin sesuai standar VRQA dan WorkSafe.

Beberapa penelitian menyoroti kebijakan keselamatan dan kesehatan di sekolah Islam dari perspektif nasional maupun internasional. Protokol anafilaksis di sekolah Australia, termasuk kebijakan alergi, rencana darurat, dan pelatihan staf, menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam kajian mutakhir (Netting et al., 2025). Selain itu, sekolah Islam Australia juga membangun lingkungan belajar yang aman melalui praktik keagamaan, ruang ekspresi religius, dan program ekstra-kurikuler yang mendukung perkembangan siswa (Ghamra-Oui, 2022). Pada konteks nasional, penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru tentang K3 dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pengalaman kerja (Pertiwi et al., 2024), sementara nilai-nilai kepemimpinan Islam turut mendorong terciptanya inklusivitas dan budaya peduli dalam implementasi kebijakan keselamatan (Dewanti et al., 2024). Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sekolah bergantung pada regulasi formal, keterlibatan staf, dan integrasi nilai moral serta spiritual. Riset AICC menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada kejelasan prosedur dan siklus evaluasi berkelanjutan. Setiap kebijakan direviu dan diaudit secara rutin, memastikan kesiapan staf, pembaruan data medis, serta kepatuhan etis dan profesional terhadap standar keselamatan.

Lembaga pendidikan Islam di Australia menempati posisi strategis yang menuntut keseimbangan antara nilai-nilai religius dan kepatuhan terhadap standar regulatif nasional. Australian Islamic Centre College (AICC) di Victoria menjadi contoh konkret lembaga yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam tata kelola pendidikan modern berbasis regulasi sekuler. Komitmen AICC tampak dalam pembinaan sosial, akademik, dan spiritual peserta didik



melalui pembelajaran berpusat pada siswa serta penanaman etos Islam dalam seluruh aktivitas sekolah (AICC, 2023). Sejalan dengan temuan sebelumnya, manajemen pendidikan Islam modern dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatan media digital untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan komunikasi lembaga (Munadi, 2021). Karena itu, kebijakan AICC tidak hanya bersifat prosedural-administratif, tetapi juga merefleksikan nilai moral dan spiritual, membentuk tata kelola berbasis *amānah* yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan akal (*ḥifẓ al-'aql*).

Berdasarkan kerangka regulatif pendidikan di Australia yang menekankan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, AICC mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mencakup *First Aid Policy*, *Distributing Medicine Policy*, *Anaphylaxis Management Policy*, *Occupational Health and Safety (OHS) Policy*, dan *Child Safe Program* (AICC, 2023; McFarland et al., 2025). Kebijakan-kebijakan ini membentuk ekosistem keselamatan yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap standar keselamatan nasional, tetapi juga berakar pada prinsip-prinsip Islam yang menempatkan keselamatan jiwa dan kesejahteraan manusia sebagai amanah ilahiah. Dalam konteks ini, *Child Safe Program* merepresentasikan penerapan nilai *ḥifẓ al-nafs* atau penjagaan terhadap jiwa, yang dalam *maqāṣid al-sharī'ah* dipandang sebagai tujuan utama syariat dalam melindungi kehidupan manusia. Konsep *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya menuntut perlindungan fisik, tetapi juga menjamin terciptanya lingkungan sosial dan pendidikan yang aman dari ancaman yang dapat merusak integritas kemanusiaan (Roslan & Zainuri, 2023). Selain itu, kebijakan berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan wujud harmonisasi antara nilai spiritual dan sistem regulasi modern, yang mengintegrasikan dimensi etika, hukum, dan tanggung jawab moral dalam tata kelola lembaga pendidikan Islam (Yusefri et al., 2024). Dengan demikian, kebijakan AICC membentuk sistem keselamatan berlapis yang terintegrasi antara aspek hukum, etika, dan spiritual. Melalui rewiu dan audit rutin, setiap kebijakan dari *First Aid* hingga *Child Safe Program* menjamin perlindungan fisik, profesional, dan moral bagi seluruh warga sekolah.

Melalui pendekatan analisis dokumen kebijakan kualitatif, penelitian ini tidak sekadar menelusuri teks kebijakan secara deskriptif, tetapi juga menafsirkan substansi dan orientasi nilai yang melandasi perumusannya. Pendekatan interpretatif ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap bagaimana nilai-nilai Islam seperti *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal) diinternalisasikan dalam sistem keselamatan yang dirancang oleh lembaga pendidikan Islam di Australia. Sejauh ini, kajian mengenai kebijakan keselamatan sekolah di Australia masih cenderung menitikberatkan pada aspek hukum, prosedural, dan teknis, tanpa mengulas secara komprehensif dimensi spiritual dan etis yang menjadi landasan penting bagi



lembaga pendidikan Islam. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana lembaga pendidikan Islam dengan fokus pada Australian Islamic Centre College (AICC), membangun model tata kelola keselamatan yang mengharmonisasikan kerangka regulatif sekuler Australia dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah*.

METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) diterapkan untuk menelaah isi dan makna kebijakan tertulis yang diterbitkan oleh Australian Islamic Centre College (AICC), tanpa menekankan implementasi di lapangan (Chand, 2025). Sumber data utama terdiri dari lima dokumen kebijakan resmi AICC, yakni *First Aid Policy*, *Distributing Medicine Policy*, *Anaphylaxis Management Policy*, *Occupational Health and Safety (OHS) Policy*, dan *Child Safe Program*. Dokumen-dokumen ini dipilih karena mencakup tiga domain utama tata kelola keselamatan sekolah yaitu kesehatan siswa, keselamatan kerja, dan perlindungan anak. Informasi yang diambil meliputi tujuan kebijakan, prosedur operasional, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pemantauan, serta indikator keberhasilan implementasi.

Analisis dokumen dilakukan melalui tiga tahap sistematis. Tahap pertama adalah identifikasi isi kebijakan, mencakup tujuan, prosedur, tanggung jawab pihak terkait, dan mekanisme evaluasi. Tahap kedua adalah klasifikasi tematik, dengan pengelompokan isi kebijakan berdasarkan domain untuk menggambarkan lingkup tanggung jawab dan fokus masing-masing kebijakan. Tahap ketiga adalah analisis makna normatif, yaitu menafsirkan setiap kebijakan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, baik pada level klasik maupun kontemporer .

Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī‘ah*, baik klasik maupun kontemporer. Pada level klasik, digunakan kerangka *al-maqāṣid al-khamsah* yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini berfungsi sebagai dasar penilaian nilai-nilai moral, etis, dan kemaslahatan dalam kebijakan sekolah.

Sementara itu, pada level kontemporer, analisis mengacu pada pengembangan *maqāṣid* yang memasukkan dimensi *tazkiyah* (penyucian dan penyempurnaan moral) serta *‘umrānīyah* (pembangunan sosial dan peradaban) (Hashem, 2023). Perspektif ini memungkinkan pembacaan yang lebih luas terhadap kebijakan AICC, tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara holistik, yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, penggunaan *maqāṣid* klasik dan kontemporer secara simultan memungkinkan analisis kebijakan AICC dari dua sisi: (1) sejauh mana kebijakan tersebut



melindungi dimensi dasar kehidupan sebagaimana digariskan syariah, dan (2) sejauh mana kebijakan itu berkontribusi pada pengembangan moral dan sosial sebagai bagian dari visi *'umrān Islāmī*. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai makna dan nilai yang terkandung di balik struktur teks kebijakan, terutama terkait integrasi regulasi pendidikan Australia dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keselamatan, tanggung jawab, dan kasih sayang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Orientasi Kebijakan Keselamatan di Australian Islamic Centre College

Analisis terhadap lima dokumen kebijakan resmi Australian Islamic Centre College (AICC) yakni *First Aid Policy*, *Distributing Medicine Policy*, *Anaphylaxis Management Policy*, *Occupational Health and Safety (OHS) Policy*, dan *Child Safe Program*, menunjukkan adanya sistem keselamatan yang terstruktur, komprehensif, dan berbasis nilai. Seluruh dokumen memposisikan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik serta komunitas sekolah sebagai fondasi utama dalam tata kelola pendidikan. Analisis riset menunjukkan bahwa setiap kebijakan AICC dijalankan melalui siklus manajemen yang sistematis perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dengan pelibatan aktif *Board*, *Principal*, dan staf dalam proses monitoring tahunan.

Kelima kebijakan ini mencakup tiga domain besar: (1) kesehatan siswa melalui *First Aid Policy*, *Distributing Medicine Policy*, dan *Anaphylaxis Management Policy*; (2) keselamatan kerja staf melalui *OHS Policy*; dan (3) perlindungan anak dari kekerasan melalui *Child Safe Program*. Struktur kebijakan tersebut memperlihatkan konsistensi dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) yang menempatkan keselamatan manusia sebagai salah satu tujuan paling mendasar syariat (Al Wasim, 2020; Roslan & Zainuri, 2023).

First Aid Policy dan Distributing Medicine Policy

Kedua kebijakan ini menekankan kesiapsiagaan medis, kecepatan respons, dan tanggung jawab staf dalam menangani kondisi darurat siswa. *First Aid Policy* mengatur pelatihan pertolongan pertama, penyediaan peralatan medis, serta prosedur pelaporan insiden kepada orang tua (AICC, 2023c). *Distributing Medicine Policy* mengatur pemberian obat hanya dengan persetujuan orang tua dan pengawasan staf yang berwenang (AICC, 2023b). Kedua kebijakan ini terhubung dengan sistem audit keselamatan tahunan yang memastikan kesiapan fasilitas dan kompetensi staf dalam menangani keadaan darurat. Hal ini memperlihatkan kesinambungan antara kebijakan kesehatan siswa dan tata kelola keselamatan sekolah secara menyeluruh.

Dalam tataran administratif, prosedur yang ketat bukan hanya sebagai pemenuhan regulasi, namun juga sebagai manifestasi tanggung jawab moral dalam melindungi kehidupan manusia yang



merupakan amanah Ilahi. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang selaras dengan kerangka nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam kerangka perlindungan jiwa, kemaslahatan, dan keadilan (Mokodenseho et al., 2024). Kedua kebijakan ini menerapkan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (penjagaan akal), karena melindungi keselamatan fisik sekaligus keseimbangan mental peserta didik. Dalam perspektif *maqāṣid al-taẓkiyah*, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada pencegahan medis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan sebagai amanah Ilahi (Hashem, 2023). Hal ini menunjukkan keterpaduan antara kesehatan jasmani dan penyucian jiwa sebagai bagian dari tujuan syariah.

Anaphylaxis Management Policy

Kebijakan ini menjadi representasi nyata dari pendekatan proaktif terhadap risiko medis di sekolah. Ia mengatur *Individual Anaphylaxis Plan*, pelatihan rutin staf, dan ketersediaan EpiPen di area strategis sekolah (AICC, 2023b). Orientasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip Islam tentang kewajiban menjaga kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*) dan menegakkan solidaritas sosial (*al-takaḥful al-ijtimā'ī*) sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam mencegah bahaya. Prinsip ini selaras dengan pandangan bahwa penerapan nilai-nilai sosial dalam kerangka syariah merupakan kewajiban komunitas Muslim untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Abd Aziz et al., 2023; Munir & Kusnadi, 2024).

Nilai moral kebijakan ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah (5:32):

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” Dengan demikian, penerapan protokol medis di AICC bukan hanya kewajiban administratif, melainkan perwujudan etika Islam yang memuliakan kehidupan manusia. Kebijakan ini menegaskan makna *ḥifẓ al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan generasi), karena menjaga keselamatan peserta didik berarti menjamin keberlanjutan kehidupan sosial. Dalam kerangka *maqāṣid 'umrāni*, kebijakan ini merefleksikan nilai solidaritas sosial (*al-takaḥful al-ijtimā'ī*) dan tanggung jawab kolektif dalam memelihara kehidupan, yang menjadi fondasi utama bagi terwujudnya masyarakat berperadaban dan berkeadilan (Hashem, 2023).

Occupational Health and Safety (OHS) Policy

Kebijakan ini memperluas cakupan keselamatan ke seluruh anggota komunitas sekolah. Ia menekankan pentingnya lingkungan kerja yang aman, audit keselamatan rutin, serta pelatihan staf tentang manajemen risiko (AICC, 2023e). Pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada



perlindungan fisik, tetapi juga menumbuhkan budaya kepedulian kolektif terhadap keselamatan sebagai bagian dari etos kerja profesional dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keselamatan diposisikan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak universal yang harus dijaga bersama sebagai perwujudan keadilan sosial.

Dalam perspektif *maqāsid al-shari'ah*, kebijakan ini mencerminkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, karena melindungi sumber daya manusia dan material sekolah. Perlindungan terhadap keduanya menjadi bagian penting dari misi pendidikan Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan material dalam kehidupan. Perlindungan jiwa dan harta menjadi dasar keberlanjutan sosial serta berperan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Nurholis, 2025; Zailani et al., 2022). Kebijakan ini mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta) melalui upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh warga sekolah. Dalam kerangka *maqāsid 'umrāni*, kebijakan ini menegaskan pentingnya keadilan sosial dan tata kelola yang etis dalam pengelolaan sumber daya manusia serta aset lembaga (Hashem, 2023). Dengan demikian, OHS Policy tidak hanya menjamin keselamatan kerja, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Child Safe Program

Program ini menjadi pilar utama perlindungan anak di AICC. Selain mengikuti *Child Safe Standards* yang ditetapkan Pemerintah Victoria, AICC menambahkan prinsip moral bahwa melindungi anak merupakan tanggung jawab keagamaan dan etika seluruh warga sekolah (AICC, 2023c). Kebijakan ini mencerminkan nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *amānah* (tanggung jawab), menjadikan perlindungan anak sebagai aspek ibadah sosial.

Hal ini sejalan dengan pandangan Islam bahwa perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban moral dan sosial yang berlandaskan ajaran syariat untuk menjaga kehidupan, martabat, dan masa depan mereka (Nurjanah, 2018). Selain itu, dalam perspektif *maqāsid al-shari'ah* kontemporer, perlindungan anak juga dipahami sebagai bagian dari tujuan syariat yang lebih luas, yaitu menjaga keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam sistem sosial modern (Ayu & Kamsi, 2022).

Dengan demikian, *Child Safe Program* tidak hanya berfungsi mencegah kekerasan dan pelecehan, tetapi juga menanamkan kesadaran spiritual tentang kemuliaan manusia sejak usia dini. Secara keseluruhan, struktur kebijakan AICC menunjukkan sistem keselamatan yang terpadu, berbasis nilai, dan berorientasi pada kesejahteraan holistik, fisik, emosional, dan spiritual. Program ini mengintegrasikan prinsip *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) dan *hifz al-dīn* (penjagaan agama) melalui perlindungan anak secara menyeluruh, baik fisik, moral, maupun spiritual. Dalam kerangka



maqāṣid al-tazkiyah, kebijakan ini berperan menanamkan nilai kesucian, akhlak, dan keimanan sebagai fondasi pembentukan generasi yang saleh, berkarakter, dan bertanggung jawab (Hashem, 2023). Dengan demikian, *Child Safe Program* menjadi wujud nyata upaya *'imārat al-ard* pemakmuran bumi yang berlandaskan nilai kasih sayang dan amanah dalam pendidikan Islam.

Integrasi Nilai Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Kebijakan Sekolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa AICC tidak hanya mematuhi kerangka regulasi nasional, tetapi juga secara sadar menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam setiap kebijakan. Pendekatan ini menciptakan harmoni antara hukum sekuler dan prinsip syariah, yang saling memperkuat dalam membangun budaya keselamatan sekolah.

Sebagai tindak lanjut dari kerangka normatif tersebut, dalam konteks kebijakan kelembagaan, pendekatan ini tercermin dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, penanganan anafilaksis, serta program mitigasi risiko yang melibatkan seluruh elemen sekolah. Sejalan dengan prinsip tersebut, pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menempatkan perlindungan jiwa (*hiḍḍ al-nafsi*) sebagai prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan sosial (Hashim & Husna, 2023).

Untuk melengkapi dimensi perlindungan tersebut, pendekatan promotif juga menjadi bagian integral dari kerangka keselamatan sekolah AICC. Selanjutnya, dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, kesejahteraan ini mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual dan material (*ḥayat al-tayyibah*) serta penciptaan kehidupan yang damai, sehingga setiap anggota komunitas dapat berkembang secara optimal (Rasool et al., 2020). Hal ini diwujudkan melalui kebijakan seperti *Occupational Health and Safety (OHS) Policy* dan *Child Safe Program*, yang tidak hanya memastikan keamanan fisik, tetapi juga mendukung kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik serta tenaga pendidik.

Ketiga, pendekatan moral-spiritual (*amanah* dan *taqwā*) menanamkan kesadaran bahwa menjaga keselamatan merupakan bagian dari tanggung jawab religius, bukan semata-mata tuntutan profesional. Dalam perspektif ini, setiap individu diharapkan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ketaqwaan, yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga sebagai epistemologi untuk memahami, berinteraksi, dan bertindak demi kesejahteraan komunitas dan lingkungan (Alhina'i & Ringer, 2025). Dengan demikian, praktik keselamatan di AICC tidak berhenti pada pemenuhan standar prosedural, tetapi juga menjadi wujud nyata dari pengamalan nilai keislaman dalam konteks pendidikan modern.

Nilai-nilai moral dan spiritual menjadikan kebijakan keselamatan di AICC sebagai instrumen pendidikan karakter yang utuh. Setiap pelatihan keselamatan tidak hanya memuat materi teknis, tetapi juga disertai refleksi tentang pentingnya menjaga sesama sebagai bagian dari ibadah,



sehingga menumbuhkan *spiritual accountability*, yakni tanggung jawab moral kepada Allah dalam setiap tindakan administratif. Dalam konteks pendidikan, *ḥifẓ al-nafs* tidak hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga perlindungan martabat, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Secara keseluruhan, kebijakan AICC menunjukkan sinergi antara *maqāṣid al-taẓkiyah* dan *maqāṣid ‘umrānī*. Kelimanya *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl* terjalin dalam sistem tata kelola yang mengedepankan keseimbangan antara spiritualitas, moralitas, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, AICC merepresentasikan model pendidikan Islam yang tidak hanya menjaga keselamatan individu, tetapi juga membangun peradaban berbasis nilai *maqāṣid* yang holistik dan berkelanjutan.

Analisis Keterpaduan dan Sinergi Antar-Kebijakan

Kelima kebijakan yang diterapkan oleh AICC tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu sistem keselamatan terpadu (*integrated safety system*) yang berfungsi membangun lingkungan belajar yang aman dan suportif. Masing-masing kebijakan memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari penanganan darurat, perlindungan kesehatan, hingga penguatan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Sinergi antar kebijakan ini menciptakan budaya sekolah yang tidak hanya fokus pada pencegahan risiko, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya keselamatan sebagai bagian dari etika dan karakter Islami. Sinergi antar kebijakan ini menjadi bukti bahwa AICC mengoperasionalkan *maqāṣid al-sharī‘ah* tidak sebatas wacana normatif, tetapi melalui praktik manajerial yang terukur dan berkelanjutan.

First Aid Policy dan *Anaphylaxis Management Policy* berperan sebagai mekanisme respons cepat terhadap situasi darurat, sedangkan *Distributing Medicine Policy* memastikan kesinambungan perawatan siswa yang memiliki kebutuhan medis khusus (Gereige et al., 2022; Russell et al., 2023). *OHS Policy* memperluas perlindungan ke seluruh staf dan lingkungan kerja, dan *Child Safe Program* menjadi payung moral yang mengikat semuanya dalam kerangka tanggung jawab bersama (AICC, 2023c).

Sistem ini menunjukkan penerapan prinsip *takaful ijtimā‘ī* (solidaritas sosial) dalam manajemen sekolah. Setiap individu memiliki peran dan kewajiban yang jelas, serta ada mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala. Evaluasi tahunan, pelatihan staf, dan audit keselamatan mencerminkan semangat *islah* (perbaikan berkelanjutan). Dengan demikian, keterpaduan kebijakan AICC tidak hanya terlihat dari struktur dokumennya, tetapi juga dari prinsip kerja kolektif dan budaya kepedulian yang dibangun. Ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan kebijakan keselamatan tidak bergantung pada peraturan semata, melainkan pada internalisasi nilai di seluruh lapisan komunitas sekolah.

Implikasi Akademik



Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan wacana kebijakan pendidikan Islam dalam konteks masyarakat Barat yang plural dan sekuler. Temuan mengenai praktik kebijakan di Australian Islamic Centre College (AICC) menunjukkan bahwa nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya relevan di wilayah hukum Islam, tetapi juga dapat dioperasionalkan secara harmonis dalam sistem hukum dan regulasi sekuler tanpa menimbulkan benturan nilai. Integrasi antara etika syariah dan prinsip tata kelola modern tersebut melahirkan model *spiritual governance*, yaitu bentuk pemerintahan atau pengelolaan lembaga yang digerakkan oleh nilai moral, spiritualitas, dan tanggung jawab kemanusiaan, bukan semata oleh kepatuhan administratif atau target efisiensi. Dalam konteks ini, AICC menjadi contoh konkret bagaimana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi pada tata kelola pendidikan global yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan manusia.

Lebih jauh, temuan penelitian ini memperluas cakrawala analisis kebijakan pendidikan Islam dari pendekatan normatif-deskriptif menuju pendekatan etik-holistik. Selama ini, kebijakan pendidikan Islam sering kali dipahami sebatas aturan atau instrumen kelembagaan yang berfungsi mengatur perilaku warga sekolah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat berperan sebagai wahana pembentukan kesadaran moral dan spiritual peserta didik, guru, dan komunitas pendidikan secara keseluruhan. Dalam paradigma ini, kebijakan bukan lagi dipandang sebagai perangkat administratif yang kaku, melainkan sebagai medium nilai yang menanamkan prinsip tanggung jawab sosial, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pendekatan etik-holistik semacam ini membuka ruang baru bagi penelitian dan praktik pendidikan Islam yang lebih reflektif, kontekstual, dan berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dengan kata lain, AICC telah berhasil mentransformasikan kebijakan keselamatan dari sekadar sistem perlindungan teknis menjadi pedagogi moral yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Melalui kebijakan yang berpijak pada *maqāṣid al-sharī'ah* keselamatan dipahami bukan hanya sebagai kewajiban profesional, tetapi juga sebagai manifestasi dari kasih sayang dan tanggung jawab moral antaranggota komunitas pendidikan. Transformasi ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan Islam di negara Barat mampu menghadirkan sintesis kreatif antara spiritualitas dan modernitas, menjadikan kebijakan sebagai sarana pendidikan nilai, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap pembangunan karakter sosial yang damai, inklusif, dan beradab.

Implikasi Praktis

Dari sisi praktik kelembagaan, model AICC dapat menjadi rujukan berharga bagi sekolah-sekolah Islam di Australia maupun di negara lain. Tiga prinsip kunci yang dapat diadopsi meliputi integrasi nilai moral dalam dokumen kebijakan, dengan mencantumkan tanggung jawab religius



secara eksplisit untuk memperkuat kesadaran etis; keterlibatan komunitas sekolah secara kolektif melalui pelatihan rutin dan audit partisipatif agar kebijakan benar-benar hidup dalam praktik sehari-hari; serta adaptabilitas terhadap regulasi nasional, di mana kepatuhan hukum dipahami sebagai bagian dari amanah keislaman, bukan sebagai kontradiksi terhadapnya. Pendekatan ini menempatkan keselamatan sebagai bagian integral dari misi pendidikan Islam yakni membentuk manusia yang selamat secara fisik, mental, dan spiritual (*insan kāmīl*).

Refleksi Kritis

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Fokus utama penelitian yang berbasis pada analisis dokumen menyebabkan temuan yang diperoleh lebih bersifat konseptual dan normatif, belum menyentuh ranah empiris terkait implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan dinamika praktik, persepsi guru, atau pengalaman langsung peserta didik dalam menerapkan kebijakan keselamatan di lingkungan sekolah. Untuk memperkaya pemahaman, penelitian lanjutan perlu dilakukan melalui pendekatan kualitatif lapangan seperti observasi, wawancara mendalam, dan studi kasus agar dapat menilai secara komprehensif sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan, dipahami, dan diterima oleh para pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, serta pihak manajemen lembaga.

Selain aspek metodologis, arah penelitian ke depan juga perlu memperluas ruang analisis terhadap konteks sosial kontemporer yang semakin kompleks. Kebijakan keselamatan di lembaga pendidikan Islam seperti AICC sebaiknya dikaji pula dari perspektif multikulturalisme, kesetaraan gender, dan kesejahteraan psikologis siswa, karena ketiganya menjadi isu penting dalam ekosistem pendidikan modern di negara Barat. Adaptasi kebijakan terhadap keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga Islam untuk memperkuat inklusivitas dan daya saingnya. Kajian yang menelusuri bagaimana nilai-nilai *maqasid al-syari'ah* diterjemahkan dalam kebijakan yang responsif terhadap keadilan sosial, kesejahteraan emosional, dan pengakuan identitas akan membuka ruang baru bagi integrasi nilai Islam dalam tata kelola pendidikan global.

Refleksi ini menjadi penting karena pendidikan Islam di Barat berada pada posisi strategis namun menantang: menjaga keutuhan identitas spiritual sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan regulatif dan etika publik modern. Dalam konteks tersebut, AICC menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut bukan hal yang saling bertentangan, melainkan dapat saling memperkaya jika dikelola dengan visi *maqasid* yang terbuka, progresif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Model kebijakan seperti yang diterapkan AICC membuktikan bahwa spiritualitas Islam dapat menjadi



fondasi rasional sekaligus moral bagi tata kelola pendidikan yang berkeadilan, humanis, dan relevan dengan masyarakat multikultural masa kini.

Sintesis Konseptual

Secara konseptual, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan keselamatan di Australian Islamic Centre College (AICC) tidak semata berfungsi sebagai perangkat administratif untuk memenuhi tuntutan regulasi pendidikan, tetapi juga sebagai refleksi moral dan spiritual dari visi Islam tentang kemanusiaan. Dalam kerangka nilai-nilai Islam, keselamatan (*safety*) dipahami bukan hanya sebagai kewajiban institusional, melainkan juga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial yang berpijak pada prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan penghormatan terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebijakan keselamatan di AICC lahir dari kesadaran teologis bahwa setiap upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan warga sekolah merupakan bagian dari ibadah sosial yang bernilai ilahiah.

Kebijakan-kebijakan tersebut secara substansial mewujudkan prinsip *hifz al-nafs* salah satu tujuan pokok *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa dan kehidupan manusia. AICC menerjemahkan prinsip ini dalam bentuk kebijakan operasional seperti *First Aid Policy*, *Anaphylaxis Management Policy*, *Occupational Health and Safety (OHS) Policy*, serta *Child Safe Program*, yang semuanya berpadu dalam satu ekosistem kebijakan berbasis nilai. Melalui sinergi antara regulasi formal dan orientasi spiritual, lembaga ini tidak hanya menciptakan prosedur respons terhadap risiko, tetapi juga membangun kesadaran moral bahwa menjaga keselamatan sesama adalah amanah dari Allah. Dengan demikian, sistem keselamatan AICC bukan hanya bertujuan melindungi fisik peserta didik dan staf, tetapi juga menumbuhkan empati, tanggung jawab sosial, dan kepedulian kolektif.

Melalui paradigma ini, AICC berhasil menghadirkan model tata kelola keselamatan sekolah yang integratif, yang menyatukan dua tradisi besar regulasi sekuler yang menekankan kepatuhan administratif dan etika syariah yang menekankan kesadaran spiritual dalam satu sistem yang harmonis. Pendekatan tersebut menjadikan AICC bukan sekadar lembaga pendidikan Islam, tetapi juga simbol dialog produktif antara nilai agama dan prinsip universal keselamatan publik. Model ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di negara Barat dapat memainkan peran strategis dalam membangun citra positif, meningkatkan kredibilitas publik, dan memperkuat relevansi moral di tengah masyarakat multikultural. Bagi AICC, keselamatan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan cerminan akhlak mulia dan ekspresi dari makna pendidikan Islam yang sejati: membentuk insan yang selamat, berilmu, berakhlak, dan berkontribusi positif bagi kemanusiaan.



KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan keselamatan di Australian Islamic Centre College (AICC) bukan sekadar instrumen administratif yang memenuhi tuntutan regulasi nasional, tetapi juga cerminan nyata nilai Islam yang berlandaskan *maqāṣid al-sharī‘ah*. Melalui kebijakan seperti *First Aid Policy*, *Distributing Medicine Policy*, *Anaphylaxis Management Policy*, *Occupational Health and Safety (OHS) Policy*, dan *Child Safe Program*, AICC mampu mengintegrasikan prinsip *ḥifẓ al nafs*, *ḥifẓ al ‘aql*, *ḥifẓ al nasl*, dan *ḥifẓ al dīn* dalam tata kelola keselamatan sekolah sehingga keselamatan dimaknai sebagai amanah spiritual dan moral yang mencerminkan nilai *tawḥīd taẓkiyah* dan *‘umrān*.

Secara teoretis penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian integratif antara pendidikan Islam regulasi sekuler dan dinamika multikultural di negara-negara Barat. Pendekatan *maqāṣid ‘umrānī* memperlihatkan bahwa orientasi syariah tidak hanya berfokus pada perlindungan individu tetapi juga pada pembangunan peradaban sosial. Studi kasus AICC menawarkan model konseptual tata kelola pendidikan Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan kerangka hukum nasional tanpa kehilangan orientasi spiritualnya sekaligus memperluas dialog akademik lintas disiplin antara etika Islam, kebijakan publik, dan filsafat pendidikan.

Secara praktis integrasi nilai Islam dan standar keselamatan yang diterapkan di AICC menghasilkan model *value driven safety governance* yang memadukan profesionalisme dan spiritualitas kelembagaan. Kebijakan keselamatan tidak hanya mengarahkan pencegahan risiko dan perlindungan fisik tetapi juga menjadi medium pendidikan karakter yang menumbuhkan kepedulian disiplin dan empati bagi seluruh warga sekolah. Pendekatan ini merepresentasikan paradigma *spiritual governance* dalam pendidikan Islam kontemporer di mana *maqāṣid al-sharī‘ah* berfungsi sebagai kerangka praksis yang membentuk budaya institusional dan pengambilan keputusan.

Sejalan dengan temuan tersebut penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam mengadaptasi model kebijakan keselamatan AICC dengan mempertimbangkan konteks hukum dan sosial setempat para pembuat kebijakan mendorong panduan integratif yang mengakomodasi nilai-nilai agama dalam desain kebijakan publik serta institusi memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan audit partisipatif dan pembinaan etika profesi. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada evaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan keselamatan berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah* di berbagai konteks pendidikan guna memperkuat tata kelola pendidikan Islam yang berorientasi pada keselamatan kemaslahatan dan pembangunan peradaban.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz, H., Abd Ghadas, Z. A., & Ossofo, A. B. (2023). Corporate social responsibility under the maqasid syariah concept in Malaysia: Why does it matter? *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 53–65. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16916>
- Abdul Rasool, M. S., Mohd Yusof, M. A., & Ali, S. M. (2020). Wellbeing of the society: A maqasid al-shari'ah approach. *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam*, 25–46. <https://doi.org/10.22452/afkar.sp2020no1.2>
- Al Wasim, A. (2020). Maqashid syari'ah menjawab tantangan post-truth era: Urgensi hifz al-'aql sebagai penyaring informasi. *International Journal Ihya' Ulum al-Din*, 21(2), 143–157. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>
- Alhinai, M., & Ringer, A. (2025). Amanah and umma: Eco-Islam and epistemological diversity in environmental communication. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1568627>
- Australian Institute of Family Studies. (2021). *Adolescent injury: Growing up in Australia snapshot series* (Issue 3).
- Australian Institute of Health and Welfare. (2024). *Injuries in children and adolescents: A significant contributor to hospitalisations in Australia*.
- Australian Islamic Centre College. (2023a). *AICC philosophy*.
- Australian Islamic Centre College. (2023b). *Anaphylaxis management policy*.
- Australian Islamic Centre College. (2023c). *Child safe program: Human resources management*.
- Australian Islamic Centre College. (2023d). *Distributing medicine policy*.
- Australian Islamic Centre College. (2023e). *First aid policy*.
- Australian Islamic Centre College. (2023f). *Occupational health and safety policy*.
- Ayu, R. F., & Kamsi. (2022). Protection of children as a philosophical and sociological base for the age limit: Maqāṣid sharī'a version of Jasser Auda. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20–41. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.25489>
- Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303–317. <https://doi.org/10.25082/AERE.2025.01.001>
- Dewanti, D. R., Hermanto, H., & Azizah, N. (2024). Unlocking harmony: How Islamic principles revolutionize safety and inclusion for special needs education. *International Journal of Contemporary Studies in Education*, 3(3), 218–225. <https://doi.org/10.56855/ijese.v3i3.1093>
- Fernandes, A., et al. (2023). School-based interventions to support healthy indoor and outdoor environments for children: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 1746. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031746>
- Gereige, R. S., Gross, T., & Jastaniah, E. (2022). Individual medical emergencies occurring at school. *Pediatrics*, 150(1), 1–16. <https://doi.org/10.1542/peds.2022-057987>
- Ghamra-Oui, N. (2022). Constructing the informal curriculum of Islamic schools in Australia. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(3), 291–307. <https://doi.org/10.1080/13602004.2023.2176068>
- Hashem, M. (2023). *Maqasid al-shari'ah: A civilizational perspective*. IIIT.
- Hashim, K. E., & Husna, A. (2023). A maqasid syariah perspective on the importance of food safety during Covid-19 pandemic. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 6(1), 51–56. <https://doi.org/10.53840/ijiefer100>
- McFarland, L., et al. (2025). Implementing child safe standards in early education settings. *Australasian Journal of Early Childhood*. <https://doi.org/10.1177/18369391251358016>
- Mokodenseho, S., et al. (2024). Analysis of the influence of fiqh and maqasid al-shariah in the formation of Islamic legal policy in Indonesia. *West Science Islamic Studies*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590>
- Mori, Y., et al. (2021). Feeling unsafe at school and associated mental health difficulties. *Children*,



- 8(3), 232. <https://doi.org/10.3390/children8030232>
- Munadi, M. (2021). The use of social media at state Islamic colleges. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 5(1), 138–156.
- Munir, A., & Kusnadi, K. (2024). Maintaining the social environment: Urgency and principles in maqasid al-shariah. *Tribakti*, 35(2), 303–320. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v35i2.5417>
- Netting, M. J., et al. (2025). National best practice guidelines for anaphylaxis prevention. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: Global*, 4(2), 100413. <https://doi.org/10.1016/j.jacig.2025.100413>
- Nurholis, M. (2025). Islamic law and environmental sustainability. *Jurnal Mediasas*, 8(3), 541–548. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.413>
- Nurjanah, S. (2018). Keberpihakan hukum Islam terhadap perlindungan anak. *Al-'Adalah*, 14(2), 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>
- Pertiwi, W. E., et al. (2024). Persepsi keselamatan dan kesehatan kerja sekolah. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 23(4), 325–331. <https://doi.org/10.14710/mkmi.23.4.325-331>
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). Teori hifz al-nafs dalam maqasid syariah. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.53840/muwafaqat.v6i1.121>
- Russell, A. F., et al. (2023). The need for required stock epinephrine in all schools. *Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 11(4), 1068–1082.e1. <https://doi.org/10.1016/j.jaip.2022.12.047>
- Yusefri, Faizin, M., & Jafar, W. A. (2024). Protecting child labor rights. *Samarah*, 8(2), 1187–1215. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.24559>
- Zailani, M. N., Satar, N. M., & Zakaria, R. H. (2022). A review of indicators for the preservation of wealth (hifz al-mal). *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 4(1), 23–29. <https://doi.org/10.24191/jipsf.v4i1.3429>

